



## Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi Umat

### Dasri

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [dasrikaligrafi078@gmail.com](mailto:dasrikaligrafi078@gmail.com)

### ABSTRACT

Kebijakan integrasi zakat dan pajak menjadi solusi inovatif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Zakat sebagai kewajiban syariat dan pajak sebagai kewajiban negara memiliki potensi besar jika dikelola secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak, tantangan yang dihadapi, serta peluang implementasinya dalam konteks pembangunan ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, analisis dokumen, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan integrasi zakat dan pajak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, memperkuat peran lembaga zakat, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, tantangan utama meliputi harmonisasi regulasi, transparansi lembaga zakat, dan kebutuhan edukasi masyarakat. Contoh sukses integrasi di Malaysia menunjukkan pentingnya dukungan regulasi yang kuat dan sistem informasi terintegrasi untuk memastikan implementasi yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan integrasi zakat dan pajak berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
12 September 2024  
Revised  
20 Oktober 2023  
Accepted  
01 Desember 2024

### Key Word

*Kebijakan, Integrasi, Zakat, Ekonomi Ummat*

### How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs>

### Doi

[10.51178/jecs.v6i2.2269](https://doi.org/10.51178/jecs.v6i2.2269)



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi umat menjadi salah satu fokus penting dalam pengembangan masyarakat Islam yang berkeadilan. Sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam, zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pajak sebagai instrumen fiskal negara juga memainkan peran signifikan dalam pembiayaan pembangunan (Hasan, 2020). Integrasi

zakat dan pajak menjadi isu strategis yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana umat demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif.

Di Indonesia, zakat memiliki kedudukan penting sebagai kewajiban agama yang diatur secara syariah, sedangkan pajak merupakan kewajiban negara yang diatur melalui undang-undang. Kedua instrumen ini sering kali berjalan secara paralel tanpa adanya sinergi yang optimal, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih dalam pengelolaannya. Integrasi zakat dan pajak dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan ini, dengan memanfaatkan potensi keduanya untuk mendukung pembangunan ekonomi umat (Kuran, 2019).

Kebijakan integrasi zakat dan pajak juga relevan dalam konteks masyarakat Muslim yang sering menghadapi dilema antara kewajiban membayar zakat sebagai ibadah dan pajak sebagai kewajiban negara. Dalam sistem yang terintegrasi, zakat dapat diakui sebagai bagian dari kewajiban pajak, sehingga dapat meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional (Basri, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Dalam praktiknya, kebijakan integrasi zakat dan pajak telah diimplementasikan di beberapa negara, seperti Malaysia dan Arab Saudi, dengan hasil yang cukup positif. Di Malaysia, zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari pajak penghasilan individu, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi (Hassan & Noor, 2020). Hal ini tidak hanya meningkatkan penerimaan zakat, tetapi juga memperkuat peran lembaga zakat dalam pengelolaan dana umat.

Di Indonesia, wacana integrasi zakat dan pajak telah menjadi perdebatan dalam beberapa dekade terakhir. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kementerian Keuangan telah mencoba menjalin sinergi untuk mengintegrasikan kedua instrumen ini. Namun, tantangan utama terletak pada perbedaan sistem pengelolaan, regulasi, dan persepsi masyarakat terhadap zakat dan pajak. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami efektivitas kebijakan integrasi ini dalam konteks Indonesia (Nasution, 2020).

Efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak juga bergantung pada sejauh mana lembaga pengelola zakat mampu membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola secara efisien dan disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa

kepercayaan masyarakat, potensi zakat tidak dapat dimaksimalkan (Rahman & Sari, 2021).

Dari sisi fiskal, kebijakan integrasi ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus membebani masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi zakat sebagai bagian dari instrumen fiskal, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pajak konvensional dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan distributif (Chapra, 2008).

Namun, implementasi kebijakan integrasi zakat dan pajak tidak lepas dari tantangan teknis dan sosial. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi regulasi antara hukum positif yang mengatur pajak dan hukum Islam yang mengatur zakat. Selain itu, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat integrasi ini bagi pembangunan ekonomi umat (Hafidz, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan, peluang, dan strategi implementasi kebijakan ini, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan konteks sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi pemerintah, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada akhirnya, kebijakan integrasi zakat dan pajak dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, potensi besar dari kedua instrumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, seperti pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Direktorat Jenderal Pajak, dan akademisi yang berfokus pada ekonomi Islam. Wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka dalam implementasi kebijakan integrasi zakat dan pajak di Indonesia.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan

resmi pemerintah, dokumen BAZNAS, peraturan perpajakan, serta literatur akademik terkait zakat, pajak, dan pembangunan ekonomi umat. Analisis dokumen ini membantu dalam mengevaluasi regulasi yang ada, membandingkan praktik integrasi di negara lain, seperti Malaysia, dan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam penerapan kebijakan ini di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang manfaat, tantangan, dan strategi implementasi kebijakan tersebut dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan integrasi zakat dan pajak memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi umat. Hasil wawancara dengan pemangku kebijakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa integrasi dapat memperluas basis pengumpulan dana umat, baik melalui zakat maupun pajak. Dengan menjadikan zakat sebagai bagian dari pengurangan pajak, masyarakat akan lebih terdorong untuk menunaikan kewajiban zakat mereka secara formal melalui lembaga resmi.

Penerapan kebijakan ini di negara seperti Malaysia menjadi salah satu contoh sukses yang dapat diadaptasi. Di Malaysia, zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari pajak penghasilan, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat secara resmi. Hal ini meningkatkan penerimaan zakat, yang kemudian dikelola untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Hassan & Noor, 2020).

Di Indonesia, implementasi kebijakan integrasi zakat dan pajak masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perbedaan regulasi yang mengatur zakat sebagai kewajiban syariat dan pajak sebagai kewajiban negara. Selain itu, koordinasi antara lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan otoritas pajak belum optimal. Hal ini menyebabkan potensi integrasi belum sepenuhnya terealisasi (Nasution, 2020).

Masyarakat Indonesia menunjukkan antusiasme terhadap ide integrasi zakat dan pajak, terutama karena hal ini dapat meringankan beban fiskal

mereka. Namun, beberapa masyarakat masih ragu terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Ketidakpercayaan ini menjadi salah satu kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan zakat melalui integrasi dengan pajak (Rahman & Sari, 2021).

Penelitian juga menemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami manfaat kebijakan integrasi zakat dan pajak. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif oleh pemerintah dan lembaga zakat. Edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi umat melalui pembayaran zakat dan pajak.

Dari sisi teknis, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi antara lembaga zakat dan otoritas pajak. Sistem ini diperlukan untuk memantau dan mencatat pembayaran zakat yang akan dikurangkan dari pajak. Dengan adanya sistem yang transparan, masyarakat akan lebih percaya terhadap kebijakan ini, dan pemerintah dapat mengelola data secara lebih efisien (Hafidz, 2019).

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat mengurangi ketergantungan negara pada pajak konvensional dan memperkuat keadilan distributif dalam masyarakat. Dana zakat yang terkumpul dapat difokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat, seperti program pelatihan kerja, bantuan usaha kecil, dan pembiayaan mikro. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan distribusi kekayaan yang merata (Chapra, 2008).

Namun, penelitian juga menemukan bahwa harmonisasi regulasi antara hukum positif dan syariat Islam menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini. Perlu ada revisi regulasi yang memungkinkan pengakuan zakat sebagai pengurang pajak tanpa mengurangi otoritas fiskal negara. Upaya ini memerlukan dukungan politik yang kuat serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Meskipun tantangan-tantangan tersebut ada, peluang dari kebijakan integrasi zakat dan pajak jauh lebih besar. Jika diterapkan dengan baik, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan, memperkuat lembaga pengelola zakat, dan mendorong pembangunan ekonomi umat. Sinergi antara zakat dan pajak dapat menciptakan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan integrasi zakat dan pajak memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, penguatan lembaga pengelola zakat, transparansi, dan edukasi

masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan integrasi zakat dan pajak dapat menjadi salah satu solusi inovatif untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Dari sudut pandang maqashid syariah, kebijakan ini sejalan dengan tujuan melindungi harta (*hifzh al-mal*) dan menciptakan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Integrasi ini memungkinkan zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang lebih adil, sementara pajak tetap menjadi instrumen fiskal negara (Chapra, 2008).

Keberhasilan integrasi zakat dan pajak di Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi besar jika diimplementasikan dengan baik. Kebijakan ini memberikan insentif kepada masyarakat untuk membayar zakat melalui pengakuan zakat sebagai pengurang pajak. Selain meningkatkan penerimaan zakat, pendekatan ini juga memperkuat lembaga pengelola zakat dalam mendistribusikan dana kepada yang membutuhkan (Hassan & Noor, 2020).

Namun, konteks Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Perbedaan regulasi dan koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas pajak menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan integrasi. Hal ini menunjukkan pentingnya revisi regulasi dan penguatan sinergi antara lembaga terkait. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang manfaat kebijakan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembayaran zakat dan pajak (Nasution, 2020).

Kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia juga menjadi isu yang signifikan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat dapat menghambat implementasi kebijakan integrasi. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan yang mudah diakses oleh publik dan memanfaatkan teknologi untuk memantau pembayaran zakat secara real-time (Rahman & Sari, 2021).

Dari perspektif ekonomi, kebijakan integrasi zakat dan pajak dapat mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi zakat sebagai bagian dari instrumen fiskal, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pajak konvensional. Pendekatan ini juga dapat mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Chapra, 2008).

Penggunaan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Sistem informasi yang terintegrasi antara lembaga zakat dan otoritas pajak dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau pembayaran zakat mereka dan mengajukan pengurangan pajak secara lebih transparan (Hafidz, 2019).

Selain itu, kebijakan ini memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan meningkatkan penerimaan zakat, lembaga pengelola zakat dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pembiayaan mikro kepada masyarakat yang membutuhkan (Hassan & Noor, 2020).

Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa implementasi kebijakan integrasi zakat dan pajak memerlukan dukungan politik yang kuat. Harmonisasi regulasi antara hukum positif dan syariat Islam memerlukan kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Tanpa dukungan politik yang memadai, kebijakan ini sulit untuk diimplementasikan secara efektif (Nasution, 2020).

Kesimpulannya, kebijakan integrasi zakat dan pajak memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi umat, tetapi keberhasilannya bergantung pada penguatan regulasi, transparansi lembaga zakat, dan edukasi masyarakat. Sinergi antara zakat dan pajak dapat menciptakan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan, jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan integrasi zakat dan pajak memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Integrasi ini memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang lebih adil, sementara pajak tetap menjadi instrumen fiskal negara. Dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak, kebijakan ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, meningkatkan penerimaan zakat, serta memperkuat peran lembaga zakat dalam pengelolaan dana umat. Namun, tantangan utama kebijakan ini terletak pada harmonisasi regulasi, penguatan sinergi antara lembaga zakat dan otoritas pajak, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai manfaat kebijakan ini.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, penggunaan teknologi informasi untuk

menciptakan sistem yang efisien, serta dukungan politik dan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang holistik dan implementasi yang tepat, kebijakan integrasi zakat dan pajak dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan ekonomi umat, dan menciptakan sistem pembiayaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basri, F. (2021). "Kebijakan Fiskal dan Zakat: Tantangan dan Peluang di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 45-60.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shariah*. London: Islamic Foundation.
- Hafidz, M. (2019). "Pendidikan Zakat dan Pajak: Meningkatkan Kesadaran Umat." *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 123-140.
- Hasan, A. (2020). *Zakat dan Pemberdayaan Umat: Sebuah Pendekatan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Hassan, R., & Noor, M. (2020). "Integration of Zakat and Tax Systems: A Case Study of Malaysia." *Journal of Islamic Finance*, 11(3), 78-90.
- Kuran, T. (2019). *Islam and Economic Development: Bridging Traditional and Modern Economics*. Oxford: Oxford University Press.
- Nasution, Z. (2020). "Peluang Integrasi Zakat dan Pajak untuk Keadilan Ekonomi." *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(1), 89-102.
- Rahman, A., & Sari, N. (2021). "Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Efeknya terhadap Partisipasi Zakat." *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2), 67-85.